



Ketimpangan Ekonomi Dan Kemiskinan Dengan Pegaruhnya Terhadap Keterlambatan Pembayaran Tagihan Listrik (Studi Kasus Pada PT PLN ULP Kolaka)

Economic Inequality and Poverty with Its Impact on Late Payment of Electricity Bills (Case Study at PT PLN ULP Kolaka)

Aiedil Pebri Suwarna¹, Alia Nova², Annisa Nurjanna³, Adil Putra Artaman⁴, Sindi Sulistiawati⁵, Husnul Mawaddah⁶

Universitas Sains Islam Almadawaddah Warahmah Kolaka

Email: Alianova342@gmail.com², Annisanurjanna99@gmail.com³, adilartaman8631@gmail.com⁴, Sindisulistiawati8@gmail.com⁵, husnulmawaddah475@gmail.com⁶

Article history :

Received : 21-01-2025

Revised : 23-01-2025

Accepted : 25-01-2025

Published: 27-01-2025

Abstract

Economic inequality and poverty are the main problems that impact people's ability to pay electricity bills on time, especially in the Kolaka area. This research uses a qualitative descriptive method to understand the relationship between economic inequality, poverty and electricity bill arrears. The research results show that people with irregular incomes, especially those from the informal sector, have difficulty fulfilling their electricity payment obligations. The impact of these late payments is felt by both the public and PLN, which is facing operational challenges due to declining revenues. The proposed solutions include targeted electricity subsidies, community economic empowerment, education about the importance of timely payments, and development of a digital payment system. Collaborative efforts from various parties are needed to reduce the impact of economic inequality on the performance of electricity services in Kolaka.

Keywords: *Electricity Prices, Consumer Decisions, Electrical Energy*

Abstrak

Ketimpangan ekonomi dan kemiskinan adalah permasalahan utama yang berdampak pada kemampuan masyarakat membayar tagihan listrik tepat waktu, terutama di wilayah Kolaka. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memahami keterkaitan ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan tunggakan tagihan listrik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat dengan pendapatan tidak tetap, terutama dari sektor informal, memiliki kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran listrik. Dampak keterlambatan pembayaran ini dirasakan baik oleh masyarakat maupun PLN, yang menghadapi tantangan operasional akibat menurunnya pendapatan. Solusi yang diusulkan meliputi subsidi listrik yang tepat sasaran, pemberdayaan ekonomi masyarakat, edukasi mengenai pentingnya pembayaran tepat waktu, dan pengembangan sistem pembayaran digital. Upaya kolaboratif dari berbagai pihak diperlukan untuk mengurangi dampak ketimpangan ekonomi terhadap kinerja layanan listrik di Kolaka.

Kata kunci: Ketimpangan ekonomi, kemiskinan, tagihan listrik, keterlambatan pembayaran,

PENDAHULUAN

Perusahaan Listrik Negara atau PT.PLN (Persero) merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa energi listrik di Indonesia. Sebagai penyedia tenaga kelistrikan satu satunya di Indonesia, PLN selalu berusaha melayani masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan akan sumber daya listrik yang baik untuk para pelanggannya. Namun dalam



pencapaiannya, PLN mengalami banyak kendala dan hambatan dalam melakukan kegiatan operasi bisnisnya di antaranya, seperti inefisiensi anggaran, keterbatasan suplai energi pembangkit listrik, pencurian listrik, jumlah tunggakan yang sangat besar terhadap pelanggan, dan lain-lain yang menimbulkan kerugian besar bagi PLN.

Jumlah tunggakan yang masih sangat besar ini disebabkan oleh sebagian besar pelanggan yang mengalami keterlambatan pembayaran berada dalam kategori ekonomi menengah ke bawah. Mereka sering kali bekerja di sektor informal seperti pedagang kecil, buruh tani, dan pekerja harian yang pendapatannya tidak tetap. Ketidakpastian penghasilan ini membuat mereka sulit memenuhi kewajiban finansial secara tepat waktu, termasuk membayar tagihan listrik bulanan dan juga masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar rekening listrik tepat waktu dan menunggak membayar tagihan rekening listrik- nya. Ada pelanggan yang menunggak 2 bulan, 3 bulan dan ada juga pelanggan yang menunggak sampai 4 bulan, permasalahan ini merupakan masalah klasik yang masih belum bisa diselesaikan oleh PLN. Hal ini mengakibatkan tingginya jumlah tunggakan tagihan listrik pasca bayar. Masih tingginya angka tunggakan memang menjadi masalah tersendiri bagi PLN walaupun PLN merupakan perusahaan negara yang memiliki kewenangan tunggal dalam memproduksi listrik dan tidak memiliki pesaing dalam memasarkan listrik. Besarnya tunggakan tersebut tentunya akan berpengaruh pada penerimaan pendapatan PLN yang nantinya akan berpengaruh terhadap kinerja PLN itu sendiri.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang didefinisikan sebagai "penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala peristiwa atau kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu," sebagai gaya penulisan analitis. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya efektivitas, sistem, perilaku, aspek, dan tindakan, secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dalam hal ini manajer PLN ULP Kolaka dan para staf pegawai yang ada di PLN ULP Kolaka tersebut merupakan subjek dari penelitian ini. Akan tetapi Subjek utama dalam penelitian ini adalah manajer PLN ULP Kolaka yang mengetahui tentang Pln secara jelas.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Ketimpangan ekonomi

Ketimpangan ekonomi adalah keadaan di mana terjadi perbedaan yang signifikan dalam pembagian kekayaan, pendapatan, atau akses terhadap sumber daya di antara individu, kelompok, atau wilayah dalam suatu Masyarakat (Lestari and Robiani 2023). Ketimpangan ini biasanya terlihat pada perbedaan antara orang kaya dan orang miskin, atau antara daerah yang maju dan yang tertinggal.(Shinetiara and Adry 2023)

a. Faktor penyebab ketimpangan ekonomi termasuk:

- 1) Pendidikan: kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan berkualitas menjadi salah satu alasan utama.



- 2) Kesempatan kerja: perbedaan akses ke lapangan kerja dengan pendapatan yang layak.
- 3) Kebijakan pemerintah: kebijakan yang tidak adil bisa meningkatkan kesenjangan antara kelompok sosial.
- 4) Globalisasi: negara atau kelompok yang tidak siap beradaptasi dengan perubahan global cenderung tertinggal.

Untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, perlu ada usaha seperti meningkatkan akses pendidikan, mengembangkan infrastruktur di daerah tertinggal, dan mengadakan program sosial yang menysasar kelompok rentan(Kurniawan 2018).

b. Dampak ketimpangan ekonomi

Ketimpangan ekonomi dapat membawa dampak negatif yang serius, baik untuk individu maupun untuk negara secara umum. Dampak-dampak tersebut antara lain (Ferezegia 2018):

- 1) Kemiskinan kelompok yang kurang mampu semakin terdesak ke dalam kemiskinan karena tidak memiliki sumber daya untuk meningkatkan taraf hidup.
- 2) Ketidakstabilan sosial perbedaan yang terlalu jauh antara kaya dan miskin dapat menyulut ketidakpuasan dan potensi konflik sosial. Si ini yang hidup mewah seringkali dilihat oleh si itu sebagai simbol ketidakadilan.
- 3) Penurunan ekonomi nasional jika sebagian besar penduduk hidup miskin, daya beli rendah, dan produktivitas nasional terbatas, maka ekonomi negara akan terpuruk.(Suhartono 2015)

c. Cara mengatasi ketimpangan ekonomi

Untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, dibutuhkan upaya bersama dari pemerintah, swasta, dan masyarakat. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil (Poor et al. 2020):

- 1) Meningkatkan akses pendidikan program beasiswa dan pendidikan gratis dapat membantu si itu yang tidak mampu agar bisa mendapat pendidikan dan mengubah masa depannya.
- 2) Pembangunan infrastruktur merata pemerintah harus memastikan infrastruktur seperti jalan, listrik, dan internet tersedia hingga ke pelosok.
- 3) Program sosial bantuan langsung, seperti bantuan sembako atau subsidi, dapat mengurangi beban warga miskin.
- 4) Pengembangan industri lokal membantu pengusaha kecil di pedesaan agar produk mereka dapat bersaing di pasar nasional maupun internasional.

2. Kemiskinan

Salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh Negara Indonesia yaitu masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional sehingga menjadi prioritas pembangunan. Selama ini, pemerintah Indonesia telah banyak memiliki program-program untuk pengentasan kemiskinan yang ada. Upaya



pengentasan kemiskinan terdapat dua strategi yang harus di tempuh. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan mereka dari berbagai bidang. Kedua, melakukan pelatihan kepada mereka agar mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha pencegahan terjadinya kemiskinan baru. Upaya pengentasan kemiskinan dilakukan untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu, terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.

Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat. Ketika data telah tersedia, maka pemerintah dapat mengambil keputusan apa saja yang harus dilakukan untuk penanggulangan tersebut. Selain itu, data yang tersedia dapat membuat pemerintah membandingkan angka kemiskinan dari tahun ke tahun. Sejalan dengan penyajian data jumlah dan persentase penduduk miskin, informasi yang tidak kalah pentingnya adalah profil kemiskinan. Informasi mengenai profil kemiskinan sangat dibutuhkan oleh pengambil kebijakan untuk penanganan masalah kemiskinan. Dengan demikian, upaya pemberdayaan masyarakat miskin dapat berjalan efisien, efektif, dan juga tepat sasaran.(Ferezegia 2018).

Kemiskinan merupakan topik inti yang selalu menjadi bahan pembicaraan negara dunia. Penanggulangan kemiskinan yang selanjutnya akan menciptakan kesejahteraan sosial merupakan tujuan akhir sebuah negara. Menjadi miskin berarti pendapatan seseorang tidak cukup untuk menutupi pengeluaran pokok, sehingga membuat hidup menjadi sebuah perjuangan yang tiada henti. Tingkat kemiskinan suatu negara atau daerah merupakan indikator yang baik mengenai taraf hidup warganya. Kemiskinan merupakan permasalahan serius di Indonesia yang masih berada pada jalur pembangunan ekonomi. Masih terdapat 24% dari 240 juta penduduk Indonesia yang hidup dalam kemiskinan, menurut tingkat kemiskinan yang didefinisikan sebagai mereka yang memiliki pendapatan tahunan kurang dari \$1.

Seseorang atau keluarga dianggap hidup dalam kemiskinan jika tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kebutuhan dasar lainnya. Mereka yang berpenghasilan kurang dari jumlah tertentu, yang disebut garis kemiskinan, dianggap miskin. Di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, kemiskinan merupakan masalah besar karena hal ini memicu kemiskinan, yang pada gilirannya memicu sejumlah tantangan lainnya. Kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif adalah dua cara untuk mengklasifikasikan tingkat kesulitan ekonomi yang berbeda. Menurut definisi apapun, kemiskinan absolut terjadi ketika sebagian besar penduduk tidak memiliki akses terhadap kebutuhan paling mendasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, sedangkan kemiskinan relatif disebabkan oleh ketidakseimbangan ekonomi yang berkontribusi terhadap kesenjangan (Ferezegia 2018).

Adapun beberapa faktor penyebab kemiskinan diantaranya:

- a. Penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin. Namun lebih tepatnya terletak pada perbedaan kualitas sumber daya manusia dan perbedaan akses modal.
- b. Penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga.
- c. Penyebab sub-budaya (subcultural), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar Penyebab agensi, yang



melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi. Karena ciri dan keadaan masyarakat dalam suatu daerah sangat beragam (berbeda) ditambah dengan kemajuan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang masih rendah.

- d. Penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur social dan kebijakan pemerintah. Kebijakan dalam negeri seringkali dipengaruhi oleh kebijakan luar negeri atau internasional antara lain dari segi pendanaan. Dan yang paling penting adalah Ketidakterataannya Distribusi Pendapatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. (Kurniawan 2018)

3. Keterlambatan pembayaran Listrik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pembayaran adalah proses, cara, perbuatan membayar. Ada pun yang menjadi peraturan – peraturan tentang pembayaran rekening listrik di PT. PLN (Persero) adalah sebagai berikut : (Sarmila 2023)

- a. Konsumen datang ke PLN atau loket yang telah ditentukan oleh pihak PLN.
- b. Pelanggan dapat membayar rekening listrik melalui tempat pembayaran
- c. yang telah ditentukan
- d. Loket pembayaran dibuka setiap hari kerja pada jam yang telah ditentukan
- e. oleh PT. PLN setempat
- f. Setiap melakukan pembayaran rekening listrik, pelanggan harus
- g. menunjukan nomor rekening yang bersangkutan.

1) Pengertian Tunggakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga (2007:1313) pengertian tunggakan adalah angsuran, pajak, tagihan dan sebagainya yang belum dibayar. Jadi dapat disimpulkan pengertian tunggakan adalah pajak yang belum dibayar selama seseorang, badan usaha, atau lembaga masih berstatus sebagai pengguna jasa.

2) Pengertian Rekening

Secara bahasa rekening adalah hitungan pembayaran (uang berlangganan, uang sewa, dan seterusnya). Rekening listrik merupakan perhitungan biaya pemakaian listrik yang wajib dibayar oleh para pelanggan setiap bulannya. Hasil perhitungan jumlah biaya pemakaian listrik ini akan berfungsi sebagai dokumen perusahaan dan sebagai bukti pembayaran bagi pelanggan.

3) Akibat dari Penunggakan Biaya Listrik

Akibat dari Penunggakan Biaya Listrik untuk PT. PLN (Persero) : Pendapatan dari PT. PLN (Persero) akan semakin menurun dan dapat berpengaruh pada peningkatan kinerja dari PT. PLN (Persero). Akibat dari Penunggakan Biaya Listrik untuk Pelanggan :

- a) Akan dikenakan biaya keterlambatan

Lewat dari waktu pembayaran yang ditetapkan (tanggal 1-20 setiap bulannya), pelanggan akan dikenakan sanksi berupa Biaya Keterlambatan (BK). Biaya keterlambatan ini dikenakan atas setiap lembar rekening dihitung untuk tiap bulan keterlambatan sesuai



dengan golongan tarifnya.

b) Akan dilakukan pemutusan sementara

PLN akan melaksanakan pemutusan sementara penyaluran tenaga listrik pada pelanggan apabila pelanggan belum melunasi pembayaran rekening listrik dalam jangka waktu 1 bulan. Pelanggan yang terlambat membayar rekening listrik dikenakan biaya keterlambatan sesuai dengan golongan tarif untuk setiap bulan keterlambatan. Penyambungan kembali akan dilakukan oleh PLN apabila pelanggan telah melunasi pembayaran rekening listrik ditambah biaya keterlambatan. Apabila dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak hari pertama pelaksanaan pemutusan sementara pelanggan belum juga melunasi pembayaran rekening listriknya maka PLN akan melakukan pemutusan rampung berupa penghentian penyaluran tenaga listrik dengan mengambil sebagian atau seluruh instalasi milik PLN. Permintaan penyambungan kembali diperlakukan sebagai permintaan penyambungan baru dan permintaan tenaga listrik wajib melunasi tunggakan dan taguhan susulan (bila ada).

c) Akan dilakukan pemutusan rampung aliran listrik

PLN akan melaksanakan pemutusan rampung (bongkar rampung) aliran listrik pada pelanggan yang sudah menunggak 3 bulan keatas.

4. Hubungan antara ketimpangan ekonomi, kemiskinan dengan tagihan listrik

Pergerakan harga energi memberikan implikasi penting terhadap pembangunan ekonomi, salah satunya pada kemiskinan. Hal ini karena konsumsi energi berkaitan langsung pada aktivitas dan kesejahteraan masyarakat melalui pemanasan dan pendinginan, penerangan, memasak, serta pengoperasian peralatan. Berbeda dari kebanyakan barang konsumsi lainnya, konsumsi energi sering dianggap sebagai kebutuhan dasar yang kepuasannya diperlukan untuk kualitas hidup yang dapat diterima. Karena akses ke bahan bakar dan listrik sangat bergantung pada tingkat harganya dan mengingat ketergantungan harga tersebut pada pilihan kebijakan (misalnya pilihan tentang perpajakan atau bauran energi), maka hubungan antara harga energi dan kemiskinan merupakan hal yang penting. Permasalahan pun terjadi, baik dari sudut pandang akademik dan kebijakan publik (Yaqin 2023).

Hubungan antara ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan tagihan listrik dapat dianalisis dari beberapa perspektif sosial dan ekonomi antaranya :

a. Ketimpangan ekonomi dan akses terhadap energi

Ketimpangan ekonomi sering kali mencerminkan perbedaan akses terhadap sumber daya, termasuk listrik. Rumah tangga dengan pendapatan rendah cenderung memiliki keterbatasan akses ke listrik yang memadai atau menggunakan listrik dengan tarif dasar lebih murah namun dengan batas pemakaian tertentu. Sebaliknya, kelompok ekonomi yang lebih tinggi memiliki akses lebih luas, termasuk penggunaan alat elektronik yang lebih banyak, namun tidak terlalu terpengaruh oleh kenaikan tagihan listrik karena daya beli mereka lebih tinggi.



b. Kemiskinan dan beban tagihan listrik

Rumah tangga miskin biasanya mengalokasikan proporsi pendapatan yang lebih besar untuk kebutuhan dasar, termasuk tagihan listrik. Ketika tarif listrik naik, beban ekonomi mereka meningkat secara signifikan, sehingga mereka harus mengurangi pengeluaran lain, seperti pendidikan atau kesehatan. Selain itu, rumah tangga miskin sering kali terpaksa menggunakan sumber energi alternatif yang lebih murah namun kurang efisien atau tidak ramah lingkungan, seperti lilin, lampu minyak, atau kayu bakar.

c. Subsidi listrik dan ketimpangan

Subsidi listrik yang ditujukan untuk membantu rumah tangga miskin sering kali tidak merata atau tidak tepat sasaran. Misalnya, kelompok berpendapatan menengah ke atas yang menggunakan daya listrik lebih tinggi mungkin mendapatkan keuntungan dari subsidi tarif listrik yang seharusnya diperuntukkan bagi rumah tangga miskin. Ketidaktepatan distribusi subsidi ini memperburuk ketimpangan ekonomi, karena kelompok miskin tetap menghadapi beban ekonomi yang besar.

d. Tagihan listrik sebagai indikator ketimpangan

Dalam beberapa kasus, tagihan listrik dapat menjadi indikator ketimpangan ekonomi. Wilayah atau rumah tangga dengan pendapatan tinggi cenderung memiliki konsumsi listrik yang jauh lebih besar dibandingkan dengan rumah tangga miskin, yang mencerminkan kesenjangan dalam standar hidup. Akses terhadap listrik juga menjadi indikator kemiskinan multidimensional. Di daerah pedesaan atau terpencil, ketidaktersediaan listrik menunjukkan ketimpangan dalam pembangunan infrastruktur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketimpangan ekonomi dan kemiskinan adalah dua isu sosial yang saling terkait dan memiliki dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk kemampuan membayar tagihan listrik tepat waktu. Di wilayah Kolaka, kondisi ini menjadi perhatian serius, terutama dalam pelayanan PLN ULP Kolaka yang menghadapi tingginya tingkat keterlambatan pembayaran tagihan listrik oleh pelanggan rumah tangga. Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan internal PLN ULP Kolaka, jumlah pelanggan yang menunggak pembayaran tagihan listrik cenderung meningkat selama beberapa tahun terakhir. Hal ini terjadi terutama pada kelompok masyarakat yang termasuk dalam kategori ekonomi menengah ke bawah. Faktor utama yang menyebabkan keterlambatan ini adalah rendahnya pendapatan keluarga, tingginya angka pengangguran, serta minimnya akses terhadap pekerjaan yang stabil dan layak.

Ketimpangan ekonomi di Kolaka dapat dilihat dari perbedaan mencolok antara kelompok masyarakat yang memiliki akses terhadap pekerjaan formal dan mereka yang bergantung pada pekerjaan sektor informal. Masyarakat yang bekerja di sektor informal seperti pedagang kecil, petani subsisten, dan pekerja lepas memiliki pendapatan yang tidak menentu. Kondisi ini membuat mereka sulit memenuhi kebutuhan pokok secara konsisten, termasuk membayar tagihan listrik. Kemiskinan struktural juga memperparah situasi ini. Banyak rumah tangga di Kolaka yang hidup dalam garis kemiskinan dan mengandalkan bantuan sosial dari pemerintah. Bantuan ini sering kali tidak mencukupi untuk menutup seluruh kebutuhan dasar keluarga, sehingga pembayaran tagihan



listrik menjadi prioritas sekunder. Sebagian besar dari mereka harus memilih antara memenuhi kebutuhan makan sehari-hari atau membayar tagihan listrik yang terus menumpuk. Dalam konteks layanan PLN, keterlambatan pembayaran menciptakan tantangan tersendiri bagi perusahaan. Ketika banyak pelanggan menunggak pembayaran, PLN menghadapi kesulitan dalam menjaga stabilitas operasional dan kualitas layanan. Pendapatan yang tidak stabil dapat memengaruhi kemampuan perusahaan dalam melakukan pemeliharaan infrastruktur dan pengembangan jaringan listrik di daerah terpencil. Dengan demikian, keterlambatan pembayaran bukan hanya menjadi masalah pelanggan, tetapi juga tantangan serius bagi keberlanjutan operasional perusahaan.

Dalam upaya mengatasi masalah ini, pemerintah dan PLN telah meluncurkan berbagai program bantuan dan subsidi listrik bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, efektivitas program ini masih perlu ditingkatkan, terutama dalam memastikan bahwa bantuan benar-benar tepat sasaran dan mampu meringankan beban ekonomi keluarga miskin. Selain itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan penciptaan lapangan kerja juga menjadi langkah penting dalam mengurangi ketimpangan ekonomi yang menjadi akar permasalahan keterlambatan pembayaran tagihan listrik. Dan perlu adanya pendekatan yang lebih holistik dari berbagai pihak terkait. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan PLN untuk memberikan subsidi atau program bantuan khusus bagi keluarga miskin yang memiliki tunggakan tagihan listrik. Program pelatihan kerja dan penciptaan lapangan kerja juga harus ditingkatkan untuk mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Di sisi lain, PLN dapat meningkatkan upaya edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar tagihan listrik tepat waktu melalui kampanye sosial dan program penghargaan bagi pelanggan yang disiplin. Pengembangan sistem pembayaran digital yang mudah diakses dan ramah pengguna juga dapat membantu mengurangi tingkat keterlambatan pembayaran.

KESIMPULAN

Ketimpangan ekonomi dan kemiskinan memiliki dampak langsung terhadap kemampuan masyarakat membayar tagihan listrik tepat waktu, terutama bagi golongan ekonomi menengah ke bawah yang pendapatannya tidak stabil. Di Kolaka, keterlambatan pembayaran listrik oleh pelanggan rumah tangga menjadi masalah serius yang dipengaruhi oleh rendahnya pendapatan, tingginya angka pengangguran, dan minimnya kesadaran akan pentingnya pembayaran tepat waktu. Kondisi ini semakin parah karena banyak keluarga harus memilih antara memenuhi kebutuhan pokok lainnya atau membayar tagihan listrik yang menunggak.

Dampak keterlambatan pembayaran tidak hanya dirasakan oleh pelanggan, tetapi juga oleh PLN, yang menghadapi penurunan pendapatan sehingga memengaruhi stabilitas operasional dan pengembangan infrastruktur. Program bantuan dan subsidi listrik yang telah diluncurkan pemerintah dan PLN masih menghadapi tantangan dalam hal efektivitas dan ketepatan sasaran. Selain itu, ketimpangan dalam distribusi subsidi sering kali membuat kelompok yang seharusnya menerima manfaat justru tidak terbantu.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan terpadu yang melibatkan pemerintah, PLN, dan masyarakat. Pemerintah perlu memperkuat program pemberdayaan ekonomi dan memastikan subsidi listrik tepat sasaran. Di sisi lain, PLN dapat meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar tagihan tepat waktu dan mempermudah proses



pembayaran melalui teknologi digital. Dengan sinergi semua pihak, diharapkan keterlambatan pembayaran dapat diminimalkan dan kualitas pelayanan listrik di Kolaka dapat terus ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ferezegia, Debrina Vita. 2018. “Jurnal Sosial Humaniora Terapan Analisis Tingkat Kemiskinan.” *Jurnal Sosial Humaniora Terapan* 4 (1): 1–6.
- Kurniawan, Dhani. 2018. “Kemiskinan Di Indonesia Dan Penanggulangannya.” *Gema Eksos* 5 (1): 1–18.
- Lestari, Putri Indah, and Bernadette Robiani. 2023. “Kemiskinan Ekstrem , Ketimpangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia” 11 (2): 1739–52.
- Poor, P R O, D A N Kemiskinan, D I Nusa, and Tenggara Barat. 2020. “Ketimpangan Regional, Pertumbuhan Ekonomi” 3 (1): 1–20.
- Shinetiara, Tania, and Melti Roza Adry. 2023. “Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan Determinan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia.” *Ecosains* 12(1): 25–32.
- Suhartono. 2015. “Ketimpangan Dan Pembangunan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Daerah Hasil Pemekaran: Studi Kasus Di Provinsi Banten Dan Gorontalo.” *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 6 (1): 33–43. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/154>.
- Rekening, Tunggakan, Listrik Pada, and P T Pln. *Pengaruh Perilaku Konsumen Terhadap Tunggakan Rekening Listrik Pada Pt. Pln (Persero) Wilayah Suluttenggo Area Manado*, 2015.
- Walalayo, Sarmila, Merry Tjoanda, Muchtar Anshary, Hamid Labetubun, and Hukum Universitas Pattimura. “Perlindungan Konsumen Terkait Keterlambatan Pembayaran Tagihan Listrik Di Masa Pandemi Covid-19” 3, no. 8 (2023): 794–809.
- Yaqin, Misbahol, M Silahul Mu, and Adhitya Wardhono. “Harga Energi Dan Tingkat Kemiskinan Di Indonesia” 12, no. 3 (2023): 221–36.